

Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>**WINDRADI**ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.405>

Sosialisasi Mitigasi Bencana di Daerah Wisata Pantai Desa Sindanglaya Anyer Banten

Rahmawati¹, Maulana Yusuf², Ardiyansah³

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya

*Corresponding Author: rahmawati@untirta.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Received: Nov 20th, 2025

Revised: Nov 29th, 2025

Accepted: Des 01st, 2025

Available online: Des 01st, 2025

KEYWORDS

Disaster Mitigation, Local Wisdom, Coastal Communities, Community Preparedness, Sindanglaya

KATA KUNCI

Mitigasi Bencana, Kearifan Lokal, Pesisir, Kesiapsiagaan Masyarakat, Sindanglaya

ABSTRACT

Disaster mitigation constitutes an essential phase in disaster management, aiming to reduce potential impacts through early identification of warning signs. At this stage, indicators of possible hazards are recognized, enabling communities to take anticipatory actions to safeguard themselves. This community engagement program focused on disaster mitigation socialization for residents in the coastal tourism area of Sindanglaya Village, which is highly vulnerable to natural hazards. The initiative aimed to equip local residents to serve as informants for tourists while also enhancing community awareness of disaster risks. The materials were delivered by geography experts, Tagana members, local community representatives, and the Regional Disaster Management Agency (BPBD). The results indicated that local wisdom, expressed through ancestral disaster-related folktales, serves as an enduring form of traditional mitigation. Additionally, communities utilize kentongan (wooden slit drums) and the mosque's call to prayer as early warning signals during potential hazard events. Evacuation route signs have been installed at key locations, directing residents to move toward hilly areas at least five kilometers from the shoreline. These findings demonstrate that combining scientific knowledge, community participation, and local wisdom effectively strengthens disaster preparedness in coastal regions.

ABSTRAK

Mitigasi bencana merupakan tahap penting dalam manajemen bencana yang bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan melalui identifikasi dini terhadap potensi ancaman. Pada tahap ini, tanda-tanda terjadinya bencana dikenali sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif untuk menyelamatkan diri. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada sosialisasi mitigasi bencana bagi masyarakat di kawasan wisata pesisir Desa Sindanglaya, yang memiliki risiko bencana tinggi. Sosialisasi bertujuan membekali masyarakat lokal agar mampu menjadi penyuluh bagi wisatawan serta meningkatkan kesadaran kolektif terkait potensi bencana. Materi disampaikan oleh akademisi bidang geografi, anggota Tagana, masyarakat lokal, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal berupa dongeng bencana yang diwariskan secara turun-temurun menjadi

Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>**WINDRADI**ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.405>

bentuk mitigasi tradisional yang masih dipercaya dan dipraktikkan. Masyarakat juga memanfaatkan kentongan serta azan di masjid atau musala sebagai tanda peringatan dini apabila bencana diperkirakan terjadi. Selain itu, pemasangan petunjuk jalur evakuasi telah dilakukan di beberapa titik strategis, dan masyarakat diarahkan untuk bergerak menuju kawasan perbukitan dengan jarak aman minimal lima kilometer dari garis pantai. Temuan ini menegaskan bahwa penggabungan pengetahuan ilmiah, pelibatan komunitas, dan kearifan lokal mampu memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayah pesisir.

PENDAHULUAN

Bencana dan pariwisata khususnya bagi Indonesia merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Keindahan alam dibarengi dengan potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Industri pariwisata sangat rentan terhadap bencana apabila tidak dikelola dengan baik. dampak bencana akan mempengaruhi ekosistem pariwisata dan pencapaian target kinerja pariwisata yang ditetapkan pemerintah. Pariwisata Indonesia ketergantungan yang sangat besar terhadap alam atau potensi alam dimana pariwisata terbentuk dari pemanfaatan sumber daya alam. Ketika terjadi bencana alam, maka sector pariwisata juga berdampak. Bencana alam yang terjadi pada obyek wisata akan mengakibatkan kerusakan fisik obyek wisata dan terjadi pandangan negative wisatawan pada obyek wisata tersebut. Bencana alam akan mengakibatkan kerusakan fisik, hilangnya kebudayaan, atraksi wisata yang dimiliki obyek wisata sehingga wisatawan enggan untuk berkunjung kembali ke lokasi tersebut. Padahal yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari pariwisata atau berwisata adalah pengalaman unik yang dirasakan oleh wisatawan. Dalam pariwisata, emosi, pikiran irasional, fantasi dan kenyataan bergabung menjadi satu pengalaman yang saling mempengaruhi. Maka, ketika obyek wisata mengalami atau terdampak bencana, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kunjungan dan kepercayaan wisatawan untuk datang kembali pada obyek tersebut.

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 menyadari bahwa permasalahan pertama sector pariwisata di Indonesia adalah karena perubahan iklim dan bencana alam. Perubahan iklim ini berdampak kepada



berbagai bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah, seperti banjir, kebakaran hutan, kemarau panjang, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Isu perubahan iklim ini juga berdampak kepada pemilihan destinasi wisata oleh wisatawan dunia. Wisatawan menjadi lebih berhati-hati dalam menentukan tujuan wisata ke daerah yang sering terkena bencana alam. Selain perubahan iklim, letak geografis Indonesia yang berada di antara lempeng benua dan lempeng samudera, yaitu lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di utara dan lempeng Pasifik di sebelah timur, telah membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana, terutama pada daerah sepanjang ring of fire dari Sumatera– Jawa– Bali–Nusa Tenggara–Banda–Maluku. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak kota-kota pantai dan sebagian wilayah pesisir Indonesia, yaitu pesisir barat Sumatera, pesisir selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara terletak pada kawasan yang rawan bencana, terutama bencana gempa bumi dan tsunami. (Kemenparekraf, 2020).

Demikian juga dengan pariwisata dan wilayah bencana di Provinsi Banten. Potensi obyek pariwisata yang besar di Provinsi Banten berdampingan dengan potensi bencana yang telah dan dapat terjadi di Provinsi Banten. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Tahun 2020, Provinsi Banten menempati urutan ke 7 sebagai daerah rawan bencana dengan skor 154,87. Ancaman bencana tersebut antara lain gempabumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan. Berikut kelas risiko bencana berdasarkan kabupaten kota di Provinsi Banten tahun 2020

Tabel 1. Tingkat risiko bencana menurut wilayah di Provinsi Banten

No	Kabupaten/Kota	Kelas Risiko
1	Kab Pandeglang	Tinggi
2	Kab Lebak	Tinggi
3	Kab Serang	Tinggi
4	Kab Tangerang	Tinggi
5	Kota Serang	Tinggi
6	Kota Cilegon	Sedang



No	Kabupaten/Kota	Kelas Risiko
7	Kota Tangerang	Sedang
8	Kota Tangerang Selatan	Sedang

Sumber: Indeks Bencana Indonesia 2020

Terdapat 4 daerah rawan bencana di Provinsi Banten dengan risiko Tinggi. Jenis ancaman bencana yang dapat terjadi dengan risiko tinggi antara lain banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kegagalan teknologi, tanah longsor dan Tsunami. Sedangkan ancaman bencana dengan risiko sedang yaitu cuaca ekstrim dan kekeringan. Sementara bencana epidemi dan wabah penyakit termasuk risiko rendah. Berdasarkan luas terdampak bencana diketahui Banjir 475.652 ha; Banjir Bandang 17.647 ha; Cuaca Ekstrim 786.755 ha, Epidemi dan Wabah Penyakit 42.619; Gelombang Ekstrim dan Abrasi 15.545; Gempabumi 931.899; Kebakaran Hutan dan Lahan 176.996; Kegagalan Teknologi 20.634 ; Kekeringan 931.903; Tanah Longsor 151.858 dan Tsunami 34.854. (Banten, 2019).

Ketika terjadi bencana alam, Tindakan yang selama ini terkait bencana lebih banyak dilakukan adalah tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sendiri dinilai masih kurang. Hal ini terlihat dari jumlah korban jiwa atau jumlah korban yang terdampak bencana di Indonesia terhitung masih tinggi (besar). Sepanjang 1 Januari hingga 26 Juni 2022, telah terjadi bencana sebanyak 1.902. akibat bencana tersebut, mengakibatkan 2.399.287 orang mengungsi, 98 orang meninggal dunia dan hilang sebanyak 15 orang. Korban luka-luka mencapai 679 orang. Bencana-bencana tersebut didominasi oleh akibat hidrometeorologi dengan 737 bencana akibat peristiwa banjir, 364 tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi sebanyak 11 kejadian dan gempa bumi sebanyak 12 kejadian. <https://nasional.sindonews.com/read/810129/15/bnpb-mencatat-1902-bencana-landa-indonesia-hingga-juni-2022-98-orang-meninggal-1656317186>.

Terkait risiko bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu pada destinasi wisata, maka setiap organisasi pasti akan mengalami risiko. Dalam industry pariwisata, risiko



diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu risiko, krisis dan bencana. Perbedaan ketiganya terletak pada tingkat keparahan dan dampaknya serta proses terjadinya peristiwa. Apabila risiko tidak dapat dituntaskan, maka risiko akan bertransformasi menjadi krisis dan seterusnya akan berubah menjadi bencana. Oleh sebab itu, banyak krisis dan bencana tetap terjadi walaupun sejak awal sudah diantisipasi oleh pemerintah maupun secara nasional. Tetapi paling tidak risiko terjadinya krisis dapat dikurangi sehingga krisis tidak fatal. (Soesono 2019). Terkait dengan apa yang terjadi di daerah wisata, Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam salah satu program kerjanya berupaya mengedukasi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Pantai atau berdekatan dengan wilayah Pantai tentang mitigasi bencana yang akan terjadi. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, 2010).

Desa Sindanglaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Cinangka yang memiliki daerah pinggir Pantai. Beberapa obyek wisata Pantai di desa Sindanglaya antara lain Pantai Pasir Putih, Pantai Kalimaya, Pantai Florida Anyer dan Pantai Cibereum. Pemukiman warga terletak Seberang jalan dari pinggir Pantai, meskipun ada beberapa pemukiman warga yang berada di daerah Pantai-pantai tersebut. Pada tahun 2018, terjadi bencana alam tsunami di selat sunda akibat longsornya anak gunung Krakatau. Pada saat kejadian tersebut, terjadi kenaikan gelombang air laut yang dinilai cukup tinggi dan hal ini menimbulkan kepanikan masyarakat. terlebih beredar informasi akan terjadi tsunami. Kepanikan tersebut menyebabkan masyarakat di daerah Anyer berlarian naik ke atas ke arah pegunungan. Meskipun demikian gelombang tsunami tidak sampai menerjang Pantai di Kawasan Anyer Serang. Atas dasar hal tersebut, dalam kegiatan kuliah kerja mahasiswa Untirta dilakukan sosialisasi tentang mitigasi bencana di daerah wisata, khususnya di Desa Sindanglaya.



METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan upaya mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat. salah satu tujuan kegiatan KKM adalah mengimplementasikan ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama kuliah di kampus. Mitigasi bencana sendiri merupakan salah satu program kerja Untirta yang berlokasi pada daerah dengan indeks risiko bencana tinggi.

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan mengundang tokoh masyarakat Desa Sindanglaya, anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon, anggota Karang Taruna Siaga Bencana Kota Cilegon yang merupakan warga lokal, anggota Balawista, perangkat desa serta masyarakat umum. Penyuluhan tentang mitigasi bencana ini diawali dengan gambaran jenis-jenis bencana dan ciri-ciri akan terjadinya bencana dari akademisi Untirta. Materi juga disampaikan oleh anggota Tagana yang merupakan warga lokal, dengan menceritakan pengalaman yang dihadapi serta tanda-tanda alam jika akan terjadi bencana yang diceritakan secara turun temurun oleh tokoh masyarakat Desa Sindanglaya. Sementara itu narasumber BPBD memberikan simulasi penyelamatan jika terjadi bencana tsunami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sindanglay terletak di Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang. Desa Sindanglaya terletak diantara pesisir Pantai dengan bukit, memiliki wilayah pemukiman, Perkebunan, persawahan dan hutan. Secara geografis Desa Sindanglaya berada di Bagian Barat Pulau Jawa. Untuk dapat menuju ke Desa Sindanglay akses transportasi sangat mudah yaitu jalur darat jalan raya Anyer. Topografi Desa Sindanglaya adalah datar dan tinggi dengan Sebagian kecil wilayah berkontur perbukitan. Ketika terjadi gelombang tinggi saat tsunami Selat Sunda, warga diarahkan untuk menuju perbukitan minimal 5 kilometer dari bibir Pantai. Sebagai daerah pertanian, hasil Perkebunan dan ternak diolah menjadi produk kemudian dijualbelikan ke pengunjung Pantai. Karakteristik masyarakat



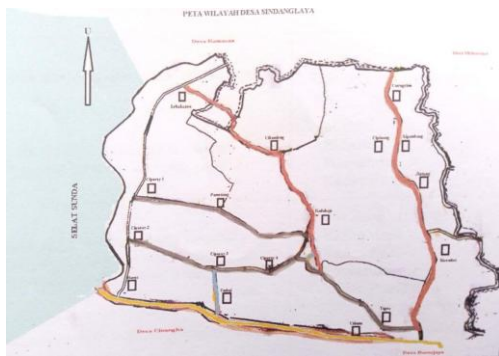
Desa Sindanglaya merupakan buruh dan pedagang. Nilai-nilai tradisi keagamaan dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Sindanglaya.

Masyarakat Desa Sindanglaya sendiri memiliki kearifan lokal berupa dongeng yang diceritakan secara turun temurun terkait tanda-tanda alam jika akan terjadi bencana. Seperti disampaikan oleh anggota Tagana sekaligus masyarakat Desa Sindanglaya bahwa menurut tutur cerita orang tuanya, jika akan terjadi bencana akan keluar burung yang tidak pernah muncul sebelumnya dan terbang rendah. Burung tersebut akan terlihat di sekitar kampung/desa selama beberapa hari. Menyadari keberadaan burung tersebut, tokoh masyarakat atau orang tua yang mengetahui tanda-tanda tersebut akan mendekati bibir Pantai dan melihat pergerakan gelombang arus laut di Pantai selama beberapa hari. Selain itu, akan keluar jenis ikan yang tidak pernah ada sebelumnya dan muncul ke permukaan laut dekat bibir Pantai. Ketika tanda-tanda tersebut semakin kuat, biasanya akan dilakukan peringatan ke masyarakat dengan memukul kentungan dan azan di masjid atau musloah serta meminta masyarakat Desa Sindanglaya naik ke atas daerah perbukitan dan menunggu disana sampai dirasa aman. Jarak aman minimal 5 kilometer dari bibir Pantai. Langkah-langkah tersebut sudah dilakukan ketika terjadi Tsunami di Selat Sunda dan terjadi kenaikan gelombang laut di sepanjang Pantai Desa Sindanglaya.

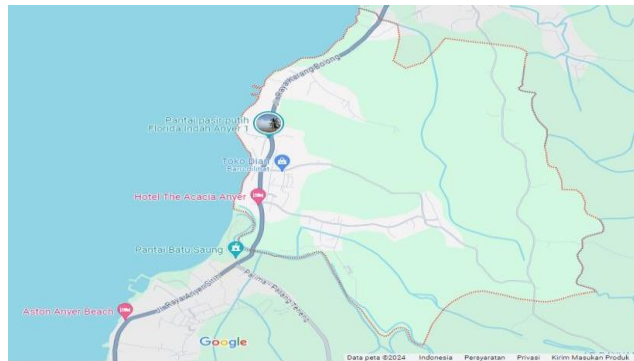
Upaya mengedukasi masyarakat tentang bencana telah banyak dilakukan oleh akademisi, seperti halnya penerapan komunikasi bencana masa mitigasi oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana di Yogyakarta. Unsur saluran komunikasi bencana dilakukan secara top down dengan lebih banyak melalui media komunikasi grup whatsapp untuk kemudian diteruskan ke tiap-tiap RT (Rukun Tetangga) dan diinformasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti sesuai dengan dokumen yang telah disusun. Komunikasi bencana masih menggunakan kearifan lokal dengan inovasi memadukan teknologi komunikasi yaitu penggunaan radio, HT dan Handphone untuk menyalurkan informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini (Khatami et al., 2022). Bencana juga dapat terjadi akibat kegagalan teknologi industri, seperti di daerah Randakari Kecamatan Ciwandan. Kurangnya informasi tentang zat-zat berbahaya yang



dikeluarkan dalam proses industri di kawasan industri petrokimia Ciwandan dapat menimbulkan dampak lebih besar, sehingga diperlukan edukasi dan kerjasama dengan pihak perusahaan untuk mengedukasi masyarakat tentang bencana akibat kegagalan teknologi industri (Rahmawati et al., 2022)



Gambar 1. Peta Desa Sindanglaya



Gambar 2: potensi wisata Pantai

Hasil wawancara dengan dinas terkait (Dinas Pariwisata dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah) mengatakan bahwa manajemen bencana di daerah wisata, Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Dinas Pariwisata telah membuat rancangan kebijakan berupa Rencana Kontigensi Krisis Kepariwisataannya khususnya destinasi wisata. Akan tetapi rencana kontigensi tersebut belum diresmikan menjadi keputusan gubernur Banten. Hal ini dikarenakan masih terjadi pembahasan terkait masih adanya penolakan dari industri pariwisata terutama hotel yang keberatan untuk memasang papan penunjuk “titik bahaya” atau jalur jalur evaluasi penyelamatan jika terjadi bencana. BPBD Provinsi Banten bidang mitigasi bencana telah melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi masyarakat dan swasta tentang mitigasi bencana, akan tetapi dari pihak pengelola hotel sendiri menolak untuk memasang tanda-tanda bahwa daerah tersebut rawan tsunami atau gelombang pasang. Pemasangan titik bahaya



tersebut dianggap berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan dan menimbulkan kepanikan/ketakutan.

Indonesia (Banten) menghadapi krisis kepariwisataan akibat bencana alam atau bencana sosial lainnya, sehingga mendesak untuk dibentuk crisis center kepariwisataan di Provinsi Banten. Ketika terjadi tsunami di Selat Sunda tahun 2018 membuat Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Banten, BMKG, Pengelola KEK Tanjung Lesung dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten menyepakati dan membuat beberapa hal mendesak terkait manajemen risiko pariwisata yaitu : perlunya membuat peta resiko dan rawan bencana Provinsi Banten, termasuk KEK Tanjung Lesung; perlunya dijadikan pedoman pembangunan kepariwisataan berbasis mitigasi dan perlu dilakukan monev secara berkala. Salah satu dari penyebab krisis terjadi, ialah penyebaran berita tidak benar mengenai suatu topik yang sesungguhnya tidak terjadi, namun memberi dampak atau efek yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk menghindari kondisi yang tidak diharapkan maka Tim Krisis merespon segala pemberitaan mengenai Tanjung Lesung, dengan cara memproduksi berita yang bersifat positif atau netral tanpa menyudutkan siapa pun. Hal ini dilakukan untuk dapat mengklarifikasi suatu pemberitaan yang tidak benar tanpa maksud menyerang suatu kelompok yang menyebarkan hoax. (Putri Widya Oktarini & Gayatri Atmadi, 2020). Hasil penelitian (Ulhaq, 2020) justru menemukan bahwa efek sebaran informasi mitigasi bencana terhadap tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat memiliki pengaruh namun tidak signifikan.

Sementara itu di Des Susukan, pengetahuan teoritis masyarakat tentang mitigasi bencana langsung masih terbatas. Namun, dengan kearifan lokal seperti kerjasama komunitas (gotong royong), doa bersama dan penanaman pohon di daerah rawan bencana untuk memperkuat lingkungan terhadap langsung dinilai memberikan dampak positif (Fitriyana & Hermanto, 2022). Di Desa Sumurup yang memiliki bencana longsor menunjukkan bahwa ketidakhadiran sistem tanggap bencana yang terstruktur dan kebijakan pemerintah yang berfokus pada pengelolaan longsor telah diidentifikasi sebagai hambatan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat melalui



pendidikan, pelatihan, dan advokasi perubahan kebijakan telah dilaksanakan untuk membangun komunitas yang tangguh (Isnaini, 2022). Selain nilai kearifan lokal dan terbentuk system tanggap bencana, hal berikutnya yang dibutuhkan sebagai bentuk mitigasi bencana adalah pembentukan peraturan desa tentang manajemen bencana dan pelatihan dalam pemetaan bencana dan perencanaan evakuasi di Desa Sungai Raya telah meningkatkan kesiapan dan ketahanan (Muzdalifah et al., 2022). Upaya-upaya tersebut di atas sebagai bentuk mitigasi bencana merupakan upaya mengatasi krisis kepariwisataan. Krisis akibat bencana di destinasi wisata merupakan krisis tertinggi dibandingkan krisis promosi pariwisata. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan dan pemulihan situasi dan kondisi kepariwisataan di suatu daerah (Wan et al., 2022).



Gambar 3: Suasana Kegiatan Sosialisasi Mitigasi Bencana di Daerah Wisata Desa Sindanglaya

SIMPULAN

Mitigasi bencana merupakan langkah penting dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat, terutama di wilayah wisata yang rentan terhadap ancaman alam seperti tsunami dan gempa bumi. Upaya ini tidak hanya berfungsi sebagai tindakan preventif, tetapi juga sebagai strategi penyelamatan agar masyarakat dapat merespons secara cepat dan tepat ketika bencana terjadi. Kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci dalam mengurangi jumlah korban jiwa dan kerusakan material. Sosialisasi yang efektif menjadi fondasi penting dalam membangun kesiapsiagaan berbasis komunitas. Peran pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal sangat dibutuhkan agar proses mitigasi



berjalan terarah dan berkelanjutan. Kolaborasi berbagai pihak juga memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat akurat dan mudah dipahami. Rekomendasi untuk pengabdian selanjutnya adalah memperluas sosialisasi ke desa-desa pesisir lainnya yang memiliki karakter risiko serupa.

Pelaksanaan mitigasi bencana akan lebih efektif apabila dilanjutkan dengan pelatihan teknis seperti simulasi tsunami yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Simulasi memungkinkan masyarakat memahami alur evakuasi, mengenali tanda peringatan dini, dan belajar mengambil keputusan cepat ketika bencana terjadi. Keterlibatan pemerintah daerah, sektor swasta, industri pariwisata, BPBD, dan media massa sangat penting untuk menciptakan koordinasi lintas sektor. Selain itu, simulasi juga membantu mengukur kesiapan infrastruktur dan jalur evakuasi yang telah direncanakan. Melalui kegiatan ini, kepanikan dapat diminimalkan dan tingkat respons masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Pelatihan rutin perlu dijadwalkan agar pengetahuan masyarakat tetap terjaga dan tidak cepat dilupakan. Rekomendasi berikutnya adalah membangun program latihan terpadu tahunan yang melibatkan sekolah, kelompok wisata, dan komunitas lokal.

Pemasangan petunjuk arah jalur evakuasi bencana merupakan bagian vital dari mitigasi struktural yang harus dilakukan secara tepat dan strategis. Penempatan rambu harus mempertimbangkan kemudahan akses, jarak terdekat menuju zona aman, dan keterlihatan rambu dalam berbagai kondisi cuaca. Rambu yang jelas dan mudah dipahami akan membantu masyarakat maupun wisatawan mengambil jalur evakuasi tercepat dalam kondisi darurat. Selain itu, rambu perlu disertai dengan informasi bahasa asing mengingat lokasi wisata yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara. Keberadaan rambu juga harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan tidak rusak, tertutup vegetasi, atau mengalami perubahan rute akibat perubahan lingkungan. Pemerintah desa dan relawan lokal perlu dilibatkan dalam pemeliharaan rutin rambu evakuasi agar fungsinya tetap optimal. Rekomendasi untuk pengabdian berikutnya adalah melakukan pemetaan digital jalur evakuasi sebagai tambahan informasi berbasis teknologi.

Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>**WINDRADI**ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.405>

Pembentukan pusat krisis bencana kepariwisataan di tingkat Provinsi Banten menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan respons cepat ketika bencana terjadi. Pusat krisis ini dapat menjadi ruang integrasi informasi, pusat komando, serta penyimpanan data risiko yang dapat digunakan untuk perencanaan jangka panjang. Kolaborasi sektor pemerintah, akademisi, dan pelaku industri pariwisata memungkinkan pusat ini menjadi wadah edukasi publik yang berkelanjutan. Selain itu, pusat krisis dapat mengembangkan modul pelatihan, peta risiko, dan panduan evakuasi yang sesuai dengan karakteristik daerah wisata. Keberadaan lembaga ini mempercepat distribusi informasi darurat dan mempermudah komunikasi lintas sektor saat situasi krisis. Dengan demikian, efektivitas mitigasi bencana akan meningkat dan masyarakat memiliki tempat rujukan yang jelas saat terjadi bencana. Rekomendasi terakhir adalah melakukan penelitian lanjutan mengenai integrasi sistem peringatan dini berbasis teknologi untuk memperkuat fungsi pusat krisis tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Banten, R. P. (2019). *Bab ii gambaran umum kondisi daerah 2.1.*
- Fitriyana, R. A., & Hermanto, F. (2022). *HIDUP BERDAMPINGAN DENGAN BENCANA , STUDI KASUS MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR (KELURAHAN SUSUKAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG).* 4(1), 7–14.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (2010).
- Isnaini, R. (2022). *BUILDING A DISASTER PREPARED VILLAGE COMMUNITY TO REDUCE THE RISK OF A LANDSLIDE DISASTER IN SUMURUP VILLAGE , BENDUNGAN DISTRICT , TRENGGALEK REGENCY.* 24(01), 56–65. <https://doi.org/10.20473/jbp.v24i1.2022.56-65>
- Kemenparekraf. (2020). Renstra Kemenparekraf 2020-2024. In *Www.Kemenpar.Go.Id* (Vol. 1, Issue July).
- Khatami, M. I., Komunikasi, D. I., Mada, U. G., Nurjanah, A., Studi, P., Komunikasi, I., & Yogyakarta, U. M. (2022). *Difusi Inovasi dalam Penerapan Komunikasi Bencana pada Masa Mitigasi oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).* 3(3).



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.405>



- Muzdalifah, S., Yuliarti, A., & Nazar, M. R. (2022). *Membangun Desa Tangguh Bencana melalui Pembentukan Peraturan Desa dan Kompetensi Penanggulangan Bencana*. 4(4).
- Putri Widya Oktarini, & Gayatri Atmadi. (2020). Manajemen Krisis Destinasi Wisata Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda oleh Humas Pemerintah. *EDUTOURISM Journal Of Tourism Research*, 2(02), 28–38. <https://doi.org/10.53050/ejtr.v2i02.136>
- Rahmawati, R., Jumiati, I. E., & Apip, A. (2022). Penyuluhan Mitigasi Bencana Kegagalan Teknologi Industri Dan Bencana Tsunami Dengan Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Komunitas*, 2(1), 19–29.
- Ulhaq, M. Z. (2020). Efek sebaran informasi mitigasi bencana thd tk pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di desa bontomanai kab gowa. *Tesis Magister Komunikasi UNHAS*.
- Wan, Y. K. P., Li, X., Lau, V. M. C., & Dioko, L. (Don). (2022). Destination governance in times of crisis and the role of public-private partnerships in tourism recovery from Covid-19: The case of Macao. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 51(December 2021), 218–228. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.03.012>